





MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DPRD KOTA YOGYAKARTA

PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS PERUBAHAN PERDA PENGELOLAAN SAMPAH

Dukungan Dewan Tuntaskan Masalah Sampah



KR-Ardhi Wahdan

Jajaran pimpinan dewan memimpin sidang paripurna terkait perubahan perda pengelolaan sampah.



KR-Ardhi Wahdan

Unsur perwakilan forum komunikasi pimpinan daerah menghadiri sidang paripurna.



KR-Ardhi Wahdan

Anggota dewan khidmat mengikuti sidang paripurna terkait perubahan perda pengelolaan sampah.

YOGYA (KR) - Tahun ini akan menjadi tonggak sejarah dalam hal pengelolaan sampah. Terutama dengan munculnya kebijakan desentralisasi penanganan sampah ke masing-masing kabupaten dan kota per April mendatang. Dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi, DPRD Kota Yogyakarta pun memberikan dukungan atas rencana perubahan perda terkait pengelolaan sampah.

Bentuk dukungan disampaikan melalui pandangan umum tiap fraksi yang ada di lembaga dewan. Sebagai bagian dari alat kelengkapan, asulan eksekutif untuk merubah perda terkait pengelolaan sampah, menjadi pencermatan di masing-masing fraksi. Dukungan pun akhirnya diberikan agar dalam proses pengelolaan sampah ke depan memiliki landasan hukum yang teras. Dengan begitu, eksekutif memiliki peran yang jelas dan terukur dalam menuntaskan persoalan sampah.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Yogyakarta FX Wisnu Sabdono Putro, dalam pandangannya menyampaikan persoalan sampah menjadi ironis ketika kawasan Kota Yogya yang merupakan ikon wisata Indonesia memiliki tampilan depan (ruang tamu) yang sangat bagus dan tertata berupa Bandara YIA, tetapi dapur berupa tempat pembuangan akhir (TPA) dan sistem pengelolaan sampah tidak tertangani dengan baik. "Masyarakat akhirnya mengalami kebingungan ketika pemda memutuskan untuk menutup TPA Piyungan sebagai respons atas kelebihan volume sampah dan kapasitas pengelolaan sampah TPA Piyungan yang sangat terbatas. Kebijakan tersebut praktis berdampak pada tumpukan sampah yang mulai banyak ditemukan di ruang publik," urainya.

Untuk itu, melalui rencana perubahan perda terkait pengelolaan sampah maka dibutuhkan terobosan dan solusi supaya persoalan persampahan tidak menjadi sumber permasalahan dalam keuangan daerah. Pasalnya, dalam perubahan perda itu dinyatakan jika pemerintah akan membiayai pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Hal ini bisa berbanding terbalik dengan semangat Kota Yogya yang melakukan branding sebagai kota pariwisata dan kota layak huni.

Sementara Fraksi PKS melalui ketua fraksinya, Triyono Hari Kuncoro, juga berharap agar beban pembiayaan kewajiban harus dihintung berdasarkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah yang dilakukan dan sesuai dengan kinerja dari pihak yang mendapat pembiayaan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS). Demikian pula dengan aturan mengenai kewajiban untuk memberikan BLPS kepada pihak yang menyelenggarakan pengelolaan sampah juga harus disertai dengan ketentuan akuntabilitas dan tata kelola yang ketat atas pembiayaan kewajiban tersebut agar tidak membuka ruang penyimpangan baru dari biaya pengelolaan sampah di Kota Yogya.

Di samping itu, Fraksi PKS meminta agar jika pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengadaan dan pengoperasian pengelolaan sampah maka perjanjian kerja sama yang dibuat harus disusun secara cermat dan dipastikan agar tidak merugikan pemkot maupun masyarakat di sekitarnya. "Rambu-rambu untuk pembuatan kerjasama ini harus dibuat agar kerja sama yang dilakukan dapat benar-benar menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Yogya," katanya.

Sedangkan Fraksi NasDem juga memberikan dukungan terkait perubahan perda karena setahun terakhir masalah sampah menjadi persoalan pelik. Ketua Fraksi NasDem Sigit Wicasono menilai tahapan pengelolaan sampah Kota Yogya meliputi kegiatan pemadatan, pengompohan, daur ulang materi atau energi. Dalam pelaksanaannya bisa dilakukan pemerintah daerah secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain terkait. "Kami dari Fraksi Partai NasDem mengusulkan pada Pemkot Yogyakarta agar memaksimalkan proses kerja sama pihak lain supaya pengelolaan sampah Kota Yogya ke depan berjalan dengan rapi dan tidak mengalami dinamika teknis lapangan," katanya.

Senyampang dengan itu, Ketua Fraksi PAN Indarwanto Eko Cahyono, sangat setuju jika pemerintah kota mulai berbenah dengan membangun infrastruktur pengolahan sampah mandiri. Kebijakan desentralisasi dalam hal penanganan sampah juga harus dilihat sebagai langkah positif untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sehingga pemkot perlu membuka peluang sebesar-besarnya kepada LSM dan komunitas untuk bisa terlibat.

Fraksi PAN juga memandang terdapat kepastian hukum sekaligus tantangan. Salah satunya menyangkut pembiayaan dalam hal ketersediaan dana yang cukup untuk membangun infrastruktur dan operasional pengolahan sampah di Kota Yogya. Begitu pula terkait kesulitan dalam menemukan lahan yang cocok untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di daerah perkotaan. Sehingga perlu adanya pendampingan dan bantuan dari Pemda DIY kepada Kota Yogya yang masih memiliki keterbatasan. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005